

**RESURGensi NILAI NILAI PANCASILA DI TENGAH REDUPNYA  
JATI DIRI BANGSA**

**Oleh : Sabit Irfani, Dwi Riyanti**

[sabit.irfani08@gmail.com](mailto:sabit.irfani08@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwiriyanti@ecampus.ut.ac.id](mailto:dwiriyanti@ecampus.ut.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri  
Yogyakarta*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka*

***Abstrak***

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu nilai nilai yang bersifat final sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Era globalisasi mengharuskan setiap orang bisa menjadi warga negara global dalam menunjukkan eksistensinya. Hal ini justru menguji bagaimana warga negara Indonesia dapat mempertahankan dan memperkenalkan nilai nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun akhir akhir ini Pancasila sebagai nilai nilai bangsa Indonesia yang bersifat final diperdebatkan kembali. Ada beberapa golongan golongan di masyarakat yang ingin dan bermaksud untuk mengganti pancasila ditengah redupnya jati diri bangsa dan paham kebangsaan. Toleransi yang menjadi nilai nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga semakin redup dan kehilangan marwahnya di dalam masyarakat.

***Kata kunci : Pancasila, Toleransi***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa dan Pancasila berhakikat sebagai pokok kaidah fundamental negara (Notonagoro, 1959). Pendiri bangsa sudah bersepakat tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, namun pro kontra di masyarakat masih sangat hangat mencuat sejak awal kemerdekaan sampai saat ini.

Kenyataan sejarah yang penuh dengan perdebatan antar elemen kebangsaan, Pancasila tidak pernah duduk tenang sebagai ideologi negara yang diharapkan sebagai jalan kemaslahatan untuk hidup damai, tenang, dan sejahtera dalam keberagaman. Kesadaran terhadap hakikat Pancasila itu di saat sekarang sangat kurang di masyarakat, bahkan menurut Ali (2010) di era reformasi, Pancasila justru dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa dan dikambinghitamkan sebagai penyebab terjadinya keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan.

Wawasan kebangsaan sebagai suatu kekuatan dinamis dapat menggerakkan segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur menuju Indonesia berkeadilan dan berkemakmuran. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya tidak dapat begitu mudah mengalami erosi, jika tidak oleh karena tingkah laku insane-insan itu sendiri yang merusaknya. Para *Founding Fathers* kita selalu menekankan “Membangun Sebuah Bangsa” (*Nation and Character Building*) dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan suatu bangsa yang berjiwa kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam abad XX, juga pentingnya *self respect* kepada bangsa itu sendiri, menumbuhkan *self confidence* dan sanggup untuk berdikari (Roeslan Abdulgani, 2000).

Pada saat ini pancasila lebih banyak di hadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi pancasila ialah member orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat (M. Sastrapratdja, 2001).

## **METHODE**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penulisan**

Penelitian ini merupakan content analysis/analisis konten/analisis isi, dengan pendekatan kualitatif-komparatif (Molleong, 1991: 3). Penelitian analisis konten merupakan penelitian yang berusaha mengungkap makna simbolik beberapa pesan (Krippendorff, 1980: 22). Secara sederhana penelitian analisis konten merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap dan menguraikan isi naskah/teks tertentu baik cetak (buku, dokumen, dan sejenisnya) maupun elektronik/digital baik audio, visual, maupun audio-visual).

### **b. Bahan atau Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsimi Arikunto (2002: 107) mengklasifikasi sumber data menjadi tiga jenis ; a. person, yaitu sumber data berupa orang. b. place, yaitu sumber data berupa tempat, dan c. paper, yaitu sumber data berupa simbol. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis paper. Sumber data tersebut berupa dokumen-dokumen primer hasil penelitian berbagai lembaga survei dan dokumen sekunder seperti buku dan dokumen-dokumen lain yang memberikan data penunjang atas dokumen primer.

### **c. Alat atau Instrument**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan *chek list* dan *recording note*. *Check list* dan *recording note* tersebut digunakan untuk melacak dan merekam data.

## PEMBAHASAN

### A. Diskursus Aktual Tentang Toleransi Di Negara Indonesia

Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Selain itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosio-kulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten, merupakan kantung masyarakat (*social enclaves*) dituntut untuk memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan partikular.

Pengukuran toleransi sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga studi di dunia, baik yang berfokus pada toleransi, kebebasan beragama/berkeyakinan, maupun yang mengukur toleransi sebagai bagian dari prinsip yang melekat pada studi demokrasi. Beberapa diantaranya adalah *Freedom House* (Amerika), PEW Forum, dan *Religious Freedom Report* Kementerian Luar Negeri Amerika. Di Indonesia, sudah beberapa tahun terakhir juga disusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Bappenas yang di dalamnya memasukkan kebebasan beragama sebagai variabel/ indikator pengukuran indeks. Dari 4 variabel kebebasan sipil dalam IDI misalnya, kebebasan beragama/berkeyakinan diturunkan menjadi 3 indikator: aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan ancaman kekerasan masyarakat.

Secara lebih spesifik, Brian J. Grim dan Roger Finke (2007) menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama/derajat toleransi

sebuah negara. Pertama, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Kedua, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Ketiga, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Variabel yang dipopulerkan Grim dan Finke ini juga diadopsi oleh Bappenas dan banyak lembaga studi lain.

Mengacu pada definisi operasional di atas dan berdasarkan pada kerangka indexing ahli dan lembaga studi yang lain, studi ini menetapkan 4 (empat) parameter sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke, yaitu: A) Regulasi Pemerintah Kota [Indikator: 1) RPJMD dan 2) kebijakan diskriminatif], B) Tindakan Pemerintah [Indikator: 3) Pernyataan dan 4) Tindakan terkait peristiwa], C) Regulasi Sosial [Indikator: 5) Peristiwa Pelanggaran], D) Demografi Agama [Indikator: 6) Komposisi penduduk berdasarkan agama] (setara institute, Laporan Indeks Kota Toleran 2017)

Data dan temuan dari Setara Institute dalam laporan Indeks Toleransi Indonesia tahun 2017 sebagai berikut :

**Kota Teratas dengan Skor Toleransi Tertinggi**

No.	Kota	Skor
1	Manado	5,90
2	Pematangsiantar	5,90
3	Salatiga	5,90
4	Singkawang	5,90
5	Tual	5,90
6	Binjai	5,80
7	Kotamobagu	5,80
8	Palu	5,80
9	Tebing Tinggi	5,80
10	Surakarta	5,72

*Sumber: Laporan Indeks Toleransi Indonesia 2017, Setara Institute*

**Kota Terbawah dengan Skor Toleransi Terendah**

No.	Kota	Skor
1	DKI Jakarta	2,30
2	Banda Aceh	2,90
3	Bogor	3,05
4	Cilegon	3,20
5	Depok	3,30
6	Yogyakarta	3,40
7	Banjarmasin	3,55
8	Makassar	3,65
9	Padang	3,75
10	Mataram	3,78

*sumber: laporan indeks toleransi indonesia 2017, setara institute*

**B. Eksistensi Pancasila Ditengah Redupnya Jati Diri Bangsa**

Setara Institute yang pada tahun 2016 melakukan survei terhadap 171 Sekolah SMA Negeri Se-DKI Jakarta dengan mengambil sampling 684 responden. Dari Data Stara Institute memaparkan 11,3% atau sekitar 77 responden setuju mengganti sistem pemerintahan menjadi Khilafah, dan 5,1% atau sekitar 35 Responden Setuju untuk mengganti Pancasila. Hal ini tentu menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam menjaga Pancasila.

Hasil Studi aktivis gerakan mahasiswa tahun 2016 yang dimuat dalam kompas halaman 2, pada 4 maret 2008 terhadap 11 Perguruan Tinggi Negeri seperti : UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, UNBRAW, UNPAD, UNHAS, UNAND, UNSRI, dan UNSYIAH. 4,5% sepakat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,80% menyetujui Syariah sebagai

pandangan hidup bangsa dan negara, 15,5% menyetujui Sosialisme sebagai pandangan hidup bangsa dan negara.

Jatidiri bangsa asing yang sekuler dan liberal semakin populer, dan akhirnya semakin menjauhkan diri dari jatidiri sendiri yang berbasis pada budaya bangsa dan Pancasila. Penguasa diduga semakin berkolaborasi dengan kekuatan asing. Faham kapitalisme liberal semakin melembaga di hati rakyat Indonesia. Karena itu banyak pihak yang menyuarakan adanya krisis jatidiri bangsa Indonesia.

Yang perlu dikembangkan ialah melahirkan ideologi kebangsaan yang memiliki hakikat membangun "*good citizen and strong nation*" (warga negara yang baik dan bangsa yang kuat). Yang baik tidaklah cukup, namun harus juga kuat (*strong*). Bangsa dan negara Indonesia harus menjadi bangsa dan negara yang kuat di berbagai bidang. Pemuda Indonesia emas haruslah pemuda yang *goodcitizen dan strongcitizen*. Hal tersebut pemuda berperan sangat penting sebagai pewaris peradaban, pewaris tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Pemuda sebagai Warga negara yang baik dan bangsa yang kuat. Karena pemuda yang baik saja tidaklah cukup, namun harus juga kuat (*strong*). Bangsa dan negara Indonesia harus menjadi bangsa dan negara yang kuat di berbagai bidang.

Mentalitas bangsa dan negara sedang diuji eksistensinya yang menyebabkan warga negara tidak percaya akan kekuatan dari ideologi bangsanya sendiri. Kita harus mengembangkan kecerdasan bangsa dengan pola-pola mentalitas yang diiringi dengan kesadaran yang kuat untuk mencintai, mempercayai, setia akan bangsa dan negara sendiri. Perlu adanya dinamika internal yaitu perubahan cara berfikir masyarakat dan bangsa.

Pendidikan harus memiliki tujuan bukan hanya untuk mengubah kecerdasan dan kompetensi saja, namun juga harus mengubah karakter dan moralitas. Paling tidak peserta didik harus dapat memiliki sikap dan

kesadaran menghargai dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Karakter manusia Indonesia harus dibentuk dan dikembangkan berlandaskan Pancasila.

Karena itulah semangat dan ideologi kebangsaan harus memiliki makna dan tujuan mengantarkan bangsa dan negara menghargai dan menguasai IPTEK yang maju. Semangat dan ideologi kebangsaan haruslah juga memiliki makna dan tujuan untuk mengembangkan semangat kemandirian dan kepercayaan akan kemampuan bangsa sendiri, agar bangsa dan negara tidak tergantung dengan kekuatan asing. Agar masyarakat dan bangsa mampu menggunakan Sumber Daya Alam sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sudah menjadi konstruksi bangsa Indonesia yang mengambil semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* untuk menanamkan nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Toleransi menjadi kunci dalam menginternalisasikan nilai nilai Pancasila. Namun kenyataan di masa sekarang sangat memperhatikan dimana toleransi bangsa Indonesia perlu dipertanyakan kembali.

Menganalisis data dan fakta yang ada di masyarakat yang mengancam nilai nilai toleransi dan eksistensi pancasila ditengah redupnya jati diri bangsa dan paham kebangsaan menjadi tanggung jawab bagi semua elemen negara. Pemerintah harus mengantisipasi berbagai gerakan dalam masyarakat yang berorientasi untuk mengganti ideologi pancasila. Peran pendidikan harus memiliki tujuan bukan hanya untuk mengubah kecerdasan dan kompetensi saja, namun juga harus mengubah karakter dan moralitas.

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar

intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

### Daftar Pustaka

- Ali, M. (2010). *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Bandung: Pustaka Cendikia Utama.
- Brian J. Grim dan Roger Finke, 2007, Religious Persecution in cross national context : Clazing Civilization or regulated in rational choice theories of religion. *Critical Sociology*. Vol 39
- Halili, dkk, 2016, laporan indeks toleransi 2016, Jakarta, Setara Institute  
———, 2017, laporan indeks toleransi 2017, Jakarta, Setara Institute
- Klaus Krippendorff. 1980. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills-London: SAGE Publication
- Lexy J Moleong. (1998). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Notonegoro, 1959, *Berita pikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia* , Yogakarta
- M. Sastrapratdja, 2001, *Pancasila sebagai visi dan referensi kritik sosial*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Roeslan Abdulgani. 2000. “Pergulatan Mewujudkan Paham Kebangsaan Memasuki Masa Depan” dalam Hendro Sumarto, *Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia*, Penerbit Universitas Negeri Jember
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945